



Entaskan Kawasan Kumuh

■ Pemkot Klaim Tersisa 3,49 Hektare

PONTIANAK, TRIBUN

- Pemkot Pontianak terus berupaya mengentaskan kawasan kumuh yang tersebar di tujuh kelurahan dengan alokasi dana dari berbagai pihak sekitar Rp 100 miliar. Tercatat saat ini kawasan kumuh tersisa sekitar 3,49 hektare dan ditargetkan tahun 2021 bebas kawasan kumuh.

"Saat ini kawasan kumuh di Pontianak tersisa sekitar 3,49 hektare. Tahun depan pihaknya akan berupaya mengurangi angka tersebut hingga nol persen," kata Wali Kota Pontianak Edi Kamtong kepada *Tribun*, Minggu (8/3).

Satu di antara melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program tersebut dinilai Edi



Penanganan kawasan kumuh dientaskan dengan berbagai pendanaan baik dari Kotaku, APBN, APBD.

Fuadi

Kepala Dinas Perkim Kota Pontianak

sebagai upaya untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh, sangat berdampak dalam mengentaskan kawasan kumuh di Kota Pontianak.

Edi mengharapkan deras-

nya perhatian pemerintah untuk mengentaskan kawasan kumuh di Kota Pontianak, juga ikuti dengan tidak ada lagi tumbuh kawasan kumuh yang baru.

"Sehingga kawasan kumuh yang sudah terbangun melalui program Kotaku harus tetap dipelihara dan dijaga," ujarnya.

Edi juga telah meninjau kawasan yang menjadi bagian dari Program Kotaku di Kelurahan Mariana dan Sungai Beliang yang kini telah dibangun sarana infrastrukturnya pada tahun 2020.

Ia menerangkan pada 2020 ini ada empat kelurahan di Kota Pontianak yang menjadi sasaran Program Kotaku di tahun 2020 ini. Dalam program Kotaku, yang menjadi indikator adalah pembenahan infrastruktur, persampahan, septik tank komunal, penghijauan dan sebagainya.

"Di luar Program Kotaku, kita juga ada perbaikan kawasan pemukiman, jalan lingkungan, bedah rumah, sambungan air bersih, persampahan, sanitasi dan lainnya," ujarnya.

Dia menilai, implementasi dari Program Kotaku terhadap sebuah kawasan, bukan tidak mungkin bisa menjadi sebuah destinasi wisata baru. Apalagi masyarakat di kawasan tersebut

■ Bersambung ke hal. 10



Capaian Kota Tanpa Kumuh

Kelurahan Mariana
Jalan beton sepanjang 62,6 meter
Drainase sepanjang 193 meter

Kelurahan Sungai Beliang
Jalan beton sepanjang 577 meter
Drainase sepanjang 392,4 meter

Kelurahan Bansir Laut
Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) sebanyak 17 unit

GRAFIK: ENRO, DATA: RHD, DAN
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas/Pemkot Pontianak

Kelurahan Bangka Belitung Laut
Jalan beton sepanjang 211 meter
IPAL sebanyak 8 unit

Kelurahan Tambelan Sampit
Jalan beton sepanjang 155 meter
Gertak kayu sepanjang 211,7 meter
IPAL sebanyak 2 unit

Kelurahan Tanjung Hilir
Jalan beton sepanjang 285 meter
IPAL sebanyak 3 unit

Kelurahan Batu Layang
Jalan beton sepanjang 95,6 meter
Drainase sepanjang 624,4 meter

Penyediaan Perumahan
Meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap rumah layak huni

Lahan Menjamin keamanan bermukim

Pembiayaan Perumahan
Meningkatkan akses MBR terhadap pembiayaan perumahan agar dapat mengakses rumah layak huni

Infrastruktur Dasar Jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, perlindungan kebakaran

Sosial Ekonomi
Menghubungkan penataan permukiman kumuh dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan kehidupan sosial penghuninya

Rencana Tata Ruang
Penegakan tata ruang dan penyediaan ruang bagi perumahan MBR dalam rencana tata ruang

Entaskan Kawasan Kumuh 7 Kelurahan

Entaskan Kawasan Kumuh

Sambungan Hal.1

mempunyai potensi untuk menciptakan kawasannya menjadi daya tarik wisata. Seperti dengan mengembangkan kerajinan tangan, produk UKM, kuliner dan sebagainya.

"Kalau masyarakat setempat mau bersinergi dengan program-program pemerintah, kita akan dampingi sehingga kawasan itu menjadi lebih maju dan masyarakatnya sejahtera," ujarnya.

Program Kotaku yang menjadi prioritas Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, juga dalam rangka mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses

sanitasi layak.

Kepala Dinas Perkim Kota Pontianak Fuadi menuturkan bahwa penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak dilakukan dengan berbagai program pendanaan satu di antaranya Program Kotaku.

"Penanganan kawasan kumuh dientaskan dengan berbagai pendanaan baik dari Kotaku, APBN, APBD, dan partisipasi masyarakat maupun pihak swasta," ujarnya.

Fuadi juga menjelaskan bahwa bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) Kotaku dilaksanakan di tujuh kelurahan di antaranya Kelurahan Mariana, Kelurahan Sungai Beliang, Kelu-

rahan Bangka Belitung Laut, Kelurahan Tambelan Sampit, Kelurahan Tanjung Hilir, dan Kelurahan Batu Layang.

"Total dana untuk penanganan kumuh di Kota Pontianak yang bersumber dari program Kotaku sebesar Rp 18,5 miliar. Sedangkan dana kolaborasi dari APBD Kota Pontianak, APBN, dan pihak swasta sebesar Rp 82,3 miliar," ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa selain pemanfaatan dana BPM di 7 kelurahan tersebut, Pemkot Pontianak juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan perbaikan rumah tak layak huni di kelurahan siantan Hulu.

"Dana yang dikucurkan sekitar Rp 2 miliar, dan sekarang sedang berjalan kegiatan pemanfaatan tahap I dengan dana sebesar Rp 1,4 miliar dengan progres capaian sebesar 60 persen," ujarnya.

Ia menambahkan untuk upaya penuntasan sisa kumuh seluas 3,49 hektar, Satu hektare di antaranya berada di Gg Semud sementara 2 hektare sisanya tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Pontianak.

"Pemkot Pontianak sudah mengajukan usulan melalui DAK Terintegrasi ke pemerintah pusat. Insyaallah akan dilaksanakan pada 2021 mendatang," ujarnya. (dan)